

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018-2021

Wahyu Diana\*, Agus Munandar

Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul, Indonesia

\*Penulis korespondensi: [wahyu.wd0312@student.esaunggul.ac.id](mailto:wahyu.wd0312@student.esaunggul.ac.id)

### Kata Kunci:

Kinerja Keuangan,  
Rasio Desentralisasi,  
Rasio Kemandirian,  
Rasio Efektivitas dan  
Efisiensi, Rasio  
Aktivitas

### Keywords:

*Financial Performance,  
Decentralized Ratio,  
Independence Ratio,  
Effectiveness and  
Efficiency Ratio, Activity  
Ratio*

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan keuangan APDB pemerintah daerah kabupaten Tanggamus untuk periode 2018-2021. Analisis yang dipakai dalam menilai kemampuan keuangan daerah menggunakan rasio desentralisasi, rasio derajat kemandirian, rasio efektivitas, dan efisiensi serta rasio aktivitas. Metode analisis deskriptif kuantitatif dan pengumpulan data yang bersifat kuantitatif didapat dari website resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Hasil studi mendapatkan derajat desentralisasi kabupaten Tanggamus tergolong sedang dan jumlah PAD relatif sangat kecil, tingkat kemandirian kabupaten Tanggamus berada di angka 33% dan masuk kategori rendah karena persentasenya masih di bawah 50%, tingkat ketergantungan kabupaten Tanggamus terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih terbilang cukup tinggi, sedangkan aktual penerimaan PAD kabupaten Tanggamus termasuk kategori cukup efektif yang disertai dengan biaya penerimaan PAD yang cukup efisien. Selain itu, perbandingan belanja langsung dan tidak langsung menunjukkan rata-rata yang lebih tinggi sehingga terlihat bahwa Pemerintah Daerah lebih mengutamakan pendanaannya guna kebutuhan masyarakat. Kebaharuan dari penelitian ini menggunakan kabupaten Tanggamus sebagai objek yang belum pernah diteliti sebelumnya.

### Diterima:

3 Oktober 2023

### Disetujui:

27 November 2023

### Dipublikasikan:

30 November 2023



### ABSTRACT

*This research was conducted to determine the financial capacity of the local government's APDB for the 2018-2021 period. The analysis used in assessing regional financial capacity uses the decentralization ratio, the degree of independence ratio, the effectiveness and efficiency ratio and the activity ratio. Quantitative descriptive analysis method and quantitative data collection were obtained from the official website of the Directorate General of Fiscal Balance. The results of the study show that the degree of decentralization of Tanggamus district is moderate and the amount of PAD is relatively very small, the level of independence of Tanggamus district is at 33% and is in the low category because the percentage is still below 50%, the level of dependence of Tanggamus district on transfer funds from the central government is still quite sufficient high, while the actual PAD revenue of Tanggamus district is quite effective, accompanied by a fairly efficient PAD revenue cost. In addition, the comparison of direct and indirect spending shows a higher average so that it is seen that the Regional Government prioritizes its funding for community needs. The novelty of this study uses the Tanggamus district as an object that has never been studied before.*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam sistem pemerintahan otonom daerah dan diatur oleh UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Otonomi daerah merupakan kedaulatan daerah dalam mengatur serta menjaga kebutuhan bersama setempat atas inisiatif sendiri menurut aspirasi penduduk NKRI (Putra et al., 2020). UU No. 33 Tahun 2004 menjadi tumpuan fundamental pelaksanaan sistem desentralisasi untuk mencapai tujuan otonomi daerah (Verawaty et al., 2020). Tujuan otonomi daerah adalah untuk menumbuhkan ketentraman rakyat, pelayanan publik serta daya saing daerah sehingga terhindar dari pemusatan kekuasaan di tingkat pusat. Otonomi daerah mensyaratkan kinerja ekonomi yang lebih baik dalam dua hal. Aspek pertama berkaitan dengan desentralisasi perpajakan, yaitu bahwa daerah berwenang mengelola dana daerah yang kekuatan utamanya adalah kapabilitas pendapatan utama daerah (PAD). Aspek selanjutnya tentang pengelolaan belanja daerah (APBD) adalah penanganannya keuangan daerah harus semakin akuntabel dan transparan yang menuntut pemanfaatan daerah untuk menggunakan belanja secara lebih efektif dan efisien (Sulistyo, 2018).

Provinsi Lampung sebelum adanya pemekaran wilayah pada 1997 hanya terdiri dari kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Utara (Endaryanto et al., 2018). Setelah terjadi pemekaran wilayah dan terdapat kabupaten baru seperti Lampung Timur, Tanggamus, Metro, Tulang Bawang, Way Kanan dan Lampung Barat hingga saat ini kondisi perekonomiannya cukup stabil namun untuk beberapa fasilitas umum seperti kondisi pembangunan jalan belum memadai. Seperti yang diketahui bahwa presiden RI mengunjungi Lampung untuk memastikan kondisi prasarana jalan yang masih belum dibangun. Akibat pembangunan belum merata dan akses sehari-hari masyarakat umum terganggu, Menkeu RI akan mengalokasikan dana Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp. 588 miliar di tahun 2023. Pada tahun 2022, realisasi belanja PUPR untuk jalan nasional meningkat menjadi Rp508,1 miliar. Total ruas jalan raya Provinsi Lampung adalah 1.289,1 kilometer. Realisasi penggunaan APBD harus dibuat pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk pemerintah pusat. Dibuatnya LKPD maka bisa diketahui kinerja pemerintah daerah dalam pengurusan APBD yang akan dinilai dengan kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan adalah kegiatan yang dilaksanakan sesudah laporan keuangan disusun berdasarkan informasi yang relevan dan menggunakan metode akuntansi dan penilaian yang benar, untuk menyajikan posisi keuangan perusahaan yang aktual (Kasmir, 2013). Kinerja keuangan adalah hasil realisasi pendapatan dan beban yang ditentukan dan dievaluasi secara akrual (Harahap, 2020). Tujuan analisis kinerja keuangan daerah dilakukan untuk mengetahui efektivitas daerah dalam pemanfaatan serta realisasi APBD. (Fahmi, 2018) menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan analisis untuk memahami sejauh mana progres perusahaan melalui implementasi kaidah penerapan keuangan yang baik dan benar. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah kota dilakukan untuk meningkatkan kekuatan pengambilan keputusan pemerintah (Monalisa, 2022). Salah satu cara untuk analisis kinerja perekonomian daerah yaitu dengan menganalisis rasio keuangan APBD yang dimiliki oleh setiap daerah (Angin et al., 2021) Kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menggambarkan fungsi keuangan daerah dalam memastikan kepatuhan AP daerah (Putri et al., 2021).

Perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan I tahun 2023 tumbuh sebesar 4,96 persen dibandingkan dengan triwulan I tahun 2022. Dari sisi manufaktur, pertumbuhan terbesar terlihat pada industri pengangkutan dan pergudangan, lebih dari 25,80 persen. Disisi lain dari segi pengeluaran, komponen ekspor barang jasa tumbuh paling tinggi senilai 10,12 persen. Pada triwulan I tahun 2023, perekonomian Provinsi Lampung tumbuh sebesar 0,79 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (Q-to-Q). Sektor dengan produksi teratas adalah pertanian, kehutanan serta perikanan sebesar 8,13 persen. Dari sisi pengeluaran, porsi belanja konsumen oleh organisasi swasta nirlaba (PK-LNPRT) meningkat paling tinggi sebesar 0,72 persen

(lampung.bps.go.id). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengumumkan bahwa hampir seluruh daerah telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas keseluruhan laporan keuangan pemerintah provinsi dalam Hasil Ikhtisar Pemeriksaan Semester Pemerintah (IHPS) Tahun 2020. Pendapat WTP tersebut diperoleh 364 dari total 415 kabupaten dan 87 dari 93 pemerintah (bpk.go.id). Meskipun kualitas LKPD 2019 secara umum meningkat, sebagian kalangan justru menurun seperti Pemda Subulussalam, Pemkab Norda Lampung dan Pemkab Konawe Selatan menurunkan opini dari WTP jadi WDP. Namun turunnya opini dari WDP ke TMP dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Jember dan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu.

Pemilihan kabupaten Tanggamus provinsi Lampung sebagai fokus penelitian karena pada tahun 2022 lalu saat konferensi pemberian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kembali meraih WTP yang ke-7 dan berturut-turut selama 5 kali diantaranya (bpk.go.id). Walaupun telah meraih WTP, hasil tinjauan kinerja yang dilakukan BPK mengungkapkan bahwa pemerintah Provinsi Lampung tahun 2020 belum terlalu efektif untuk mencapai tujuan stabilitas jalan guna mendukung lalu lintas penumpang dan barang. Tujuan dilakukannya riset ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan kabupaten Tanggamus dengan skala rasio-rasio keuangan sebagai ukuran selama periode. Penelitian ini dinantikan bisa menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemakai informasi keuangan Tanggamus maupun bisa dijadikan literatur oleh peneliti selanjutnya.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode analisis deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data yang bersifat kuantitatif didapat dari website resmi djpk.kemenkeu.go.id dan metode analisis data menggunakan rasio keuangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran (APBD) kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus 2018-2021.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Rasio Derajat Desentralisasi

**Tabel 1. Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Derajat Desentralisasi
2018	(911,443,208)	1,472,754,290,015	-0.06%
2019	76,050,778,580	1,711,964,522,615	4.44%
2020	76,828,494,694	1,634,262,482,308	4.70%
2021	95,786,639,301	1,652,125,879,036	5.80%

Sumber: Data diolah (2023)

Rasio ini mencerminkan tingkat kesanggupan pemerintah daerah dalam kontribusi perolehan PAD terhadap total pendapatan. Kontribusi PAD selama 2018-2021 terhadap total keseluruhan pendapatan kabupaten Tanggamus adalah 3.8%. Rasio kontribusi berada di bawah 10% yang menandakan sangat rendah atau tingkat dependensi pemerintah pusat masih relatif tinggi. Dari hasil kalkulasi sebelumnya, didapati rasio paling tinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 5.8% sedangkan rasio paling rendah terjadi pada tahun 2019 sebesar -0.06% karena PAD pada tahun tersebut menunjukkan angka negatif yang disebabkan oleh realisasi PAD sah lebih tinggi jika dibandingkan dengan pendapatan retribusi daerah. Tingginya rasio di 2021 didapat dari salah satu komponen perolehan PAD tertinggi yang berasal dari penerimaan pajak daerah dan PAD lain-lain yang sah. Tanggamus merupakan daerah pemekaran dan kinerja keuangan daerah pemekaran tergolong lebih tinggi dibanding dengan kabupaten induk. Hal ini disebabkan karena daerah pemekaran cenderung mengalami penurunan dalam indikator ketergantungan

pajak, perolehan pendapatan, porsi belanja modal, dan penurunan kontribusi sektor publik (Endaryanto et al., n.d.).

### Rasio Kemandirian

**Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Bantuan Pusat & Pinjaman	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
2018	(911,443,208)	1,323,499,952,931	-0.07%	Instruktif
2019	76,050,778,580	1,423,855,769,136	5.34%	Instruktif
2020	76,828,494,694	1,080,168,166,694	7.11%	Instruktif
2021	95,786,639,301	290,259,750,000	33.00%	Konsultatif

Sumber: Data diolah (2023)

Perhitungan rasio ini membandingkan antara PAD dengan total bantuan pusat dan pinjaman. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan angka perolehan sebesar 33% atau masih berada di bawah 50% dengan pola hubungan konsultatif. Pola hubungan konsultatif menandakan pemerintah daerah diperkirakan lumayan mampu mengelola otonomi daerah. Rasio paling rendah terjadi pada tahun 2018 dikarenakan jumlah PAD negatif.

### Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD

**Tabel 3. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas**

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio Efektivitas PAD
2018	(911,443,208)	0	0%
2019	76,050,778,580	97,328,147,574.94	78.14%
2020	76,828,494,694	100,965,303,213.28	76.09%
2021	95,786,639,301	124,540,693,327.00	76.91%

Sumber: Data diolah (2023)

**Tabel 4. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi**

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi PAD	Rasio Efisiensi PAD
2018	1,193,641,582,547.80	(911,443,208.00)	-130961.71%
2019	1,292,188,880,711.67	76,050,778,580.12	1699.11%
2020	1,648,643,730,414.86	76,828,494,694.47	2145.88%
2021	1,658,185,016,498.79	95,786,639,301.16	1731.12%

Sumber: Data diolah (2023)

Kemampuan pemda dalam merealisasikan anggaran untuk sebuah tujuan cukup efektif dengan rasio rata-rata 77 %. Semakin tinggi angka rasio, maka semakin bagus dan efektif perealisasi anggaran tersebut. Penyebab penurunan angka efektif dari tahun ke tahun adalah karena tidak terhimpunnya penerimaan PAD maupun kurangnya kesadaran masyarakat dan wajib pajak daerah dalam melakukan kewajibannya (Harahap, 2020). Tahun 2018 realisasi anggaran 0 karena PAD menunjukkan angka minus. Seperti yang terlihat pada tabel rasio efisiensi bahwa ditahun 2018 mengalami minus namun realisasi belanja sangat besar. Sementara itu rasio efisiensi menunjukkan besarnya total biaya yang dipakai untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Besarnya biaya untuk perolehan pendapatan ini setiap daerah bervariasi. Semakin rendah tingkat rasio maka semakin bagus kemampuan pemda dalam memperoleh pendapatan (Susanto, 2019).

## Rasio Aktivitas

**Tabel 5. Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas**

Tahun	Total Belanja Langsung	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Langsung
2018	697,728,415,338.80	1,193,641,582,547.80	58.45%
2019	1,002,740,222,362.67	1,292,188,880,711.67	77.60%
2020	973,043,265,613.63	1,648,643,730,414.86	59.02%
2021	1,054,566,310,778.65	1,658,185,016,498.79	63.60%

  

Tahun	Total Belanja Tidak Langsung	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Tidak Langsung
2018	80,762,172,979.00	1,193,641,582,547.80	6.77%
2019	46,971,522,319.00	1,292,188,880,711.67	3.64%
2020	50,656,968,290.00	1,648,643,730,414.86	3.07%
2021	35,551,259,769.00	1,658,185,016,498.79	2.14%

Sumber: Data diolah (2023)

Perhitungan rasio ini merupakan kemampuan pemda dalam memanfaatkan dan memprioritaskan dana APBD untuk keperluan belanja langsung maupun tidak langsung. Hasil kalkulasi dari belanja langsung menunjukkan angka rata-rata 64.67% sedangkan belanja tidak langsung mendapat angka rata-rata sebesar 4% selama kurun waktu 2018-2021. Hal ini berarti pemda lebih memprioritaskan alokasi dalam pelaksanaan belanja untuk aktivitas yang secara langsung akan memberi dampak pada keluaran (Putri et al., 2021).

## 4. KESIMPULAN

Hasil analisis kinerja keuangan kabupaten Tanggamus menunjukkan angka rasio yang beragam, mulai dari rasio Derajat Desentralisasi yang masih sangat rendah sehingga dianggap kemampuan pemda dalam otonomi daerah masih bergantung pada pemerintah pusat. Kemandirian kabupaten Tanggamus dengan hasil pola hubungan konsultatif dan menandakan bahwa pemerintah daerah dinilai lumayan mampu menjalankan otonomi daerahnya. Sementara itu tingkat efektivitas dan efisiensi cukup efektif dengan angka realisasi diatas 50% serta rasio aktivitas telah sesuai dengan pemanfaatan belanja prioritas guna mendapatkan PAD. Pemerintah Tanggamus secara garis besar dianggap mampu menjalankan otonomi daerah walaupun masih ada ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Realisasi belanja cukup efektif dan bisa dikategorikan bahwa pemerintah daerah kabupaten Tanggamus menggunakan anggaran tersebut untuk kepentingan masyarakat.

## 5. SARAN

Saran untuk peneliti selanjutnya bisa menambah jangka waktu penelitian, karena terbatasnya data pada website resmi hanya sampai tahun 2021 maka peneliti tidak melakukan penelitian sampai tahun terbaru. Selain menambah waktu penelitian, penulis selanjutnya juga bisa menambahkan rasio-rasio pengukuran kinerja keuangan lainnya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Angin, D. B. P., & Hasibuan, M. Z. (2021). Analisis Kinerja Keuangan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Jl. Sisingamangaraja Medan. *Jurnal Ilmu Manajemen* 6(1). <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMM/article/view/2118/1543>
- Bpk.go.id. (2021). *Opini WTP Laporan Keuangan Pemda Alami Peningkatan* | bpk.go.id <https://www.bpk.go.id/news/opini-wtp-laporan-keuangan-pemda-alami-peningkatan>

- Bpkp.go.id. (2022). *Pemerintah Provinsi Lampung berhasil meraih Opini WTP ke-8 kalinya*  
<https://www.bpkp.go.id/lampung/berita/read/35617/55/Pemerintah-Provinsi-Lampung-berhasil-meraih-Opini-WTP-ke-8-kalinya.bpkp>
- Endaryanto, T., Firdaus, M., Siregar, H., & Hakim, D. B. (2018). Analisis Kinerja Ekonomi dan Keuangan Daerah di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*. 20(1).  
<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i1.9501>
- Fahmi, I. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan: Panduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan*. Alfabeta.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34.  
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- Kasmir. (2013). *Analisis laporan keuangan* (11th ed.). Rajawali Pers.
- Lampung.bps.go.id. (2023). *Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Triwulan I-2023* |  
lampung.bps.go.id.  
<https://lampung.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/1125/pertumbuhan-ekonomi-provinsi-lampung-triwulan-i-2023.html>
- Monalisa, M. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Rasio Keuangan. *Jurnal Health Sains*, 3(8), 1062–1071.  
<https://doi.org/10.46799/jsa.v3i8.462>
- Putra, B. P. & Hidayah, R. U. (2020). Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten / Kota Sebelum dan Setelah Pemekaran Daerah Sumatera Selatan. *COSTING : Journal of Economic, Business and Accounting*, 4(1).
- Putri, R. S. E., & Munandar, A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*. 5(3). <https://doi.org/10.31955/mea.v5i3.1684>
- Sulistyo, A. T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik*. 3(1)  
<https://doi.org/10.33105/itrev.v3i1.22>
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi: Journal of Management and Business*. 7(1).  
<https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- Verawaty, Puspanita, I., Nurhidayah, & Kemala Jaya, A. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan. *Management, Business, and Accounting*. 19(1).  
<https://doi.org/10.33557/mbia.v19i1.560>